

Peningkatan Literasi Pajak Daerah Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah untuk Mendorong Pertumbuhan dan Formalisasi di Kabupaten Soppeng

Asmi Rahayu¹, Nur Achriaty Achmar², Ahmad Fajar³

Universitas Lamappapoleonro, Indonesia^{1,2,3}

Corresponding Author: rahayu@unipol.ac.id¹, achriaty@unipol.ac.id²

Info Artikel

Submitted: 29 Juli 2026

Revised : 19 Agustus 2026

Accepted: 30 Agustus 2026

Published: 04 September 2026

Keywords: MSMEs, local tax literacy, business formality, NIB, business management, community empowerment, Soppeng Regency.

Kata Kunci: UMKM, literasi pajak daerah, formalitas usaha, NIB, manajemen usaha, pemberdayaan masyarakat, Kabupaten Soppeng.

Abstract

*Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in supporting the local economic growth of Soppeng Regency by creating jobs, increasing community income, and strengthening the regional economy. However, many MSME operators still face various challenges, particularly low local tax literacy, limited administrative capabilities, inadequate financial record-keeping, and low levels of business formality. Consequently, these operators often lack an understanding of local tax obligations, administrative procedures, and the benefits of legal recognition for business development. This Community Service Program (PKM) aims to enhance MSME operators' understanding and awareness of local tax literacy and to encourage business formalization through education, training, and mentoring activities. The solutions provided include training on local taxation and simple financial record-keeping, assistance with business legalization—specifically obtaining the Business Identification Number (NIB)—as well as efforts to boost production capacity and strengthen digital marketing. The implementation process involves stages such as outreach, training, technology application, mentoring and evaluation, and ensuring program sustainability. Partners are actively involved by providing business data, participating in training, developing Standard Operating Procedures (SOPs), and committing to increasing business formality. Expected outcomes include improved local tax literacy, the establishment of simple financial record-keeping systems, increased business legalization, and enhanced MSME management and marketing capabilities. This program also supports the implementation of the *Merdeka Belajar Kampus Merdeka* (MBKM) initiative and higher education Key Performance Indicators (IKU) by involving students in community empowerment based on real-world experience.*

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal Kabupaten Soppeng melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penguatan ekonomi daerah. Namun, sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala, terutama rendahnya literasi pajak daerah, keterbatasan administrasi usaha, lemahnya pencatatan keuangan, serta rendahnya tingkat formalitas usaha. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku UMKM belum memahami kewajiban perpajakan daerah, prosedur administrasi usaha, serta manfaat legalitas usaha dalam mendukung pengembangan bisnis. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai literasi pajak daerah serta mendorong proses formalitas usaha melalui kegiatan edukasi, pelatihan, dan

pendampingan. Solusi yang diberikan meliputi pelatihan perpajakan daerah, pencatatan keuangan sederhana, pendampingan legalitas usaha melalui pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), peningkatan kapasitas produksi, serta penguatan pemasaran digital. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan dan evaluasi, serta keberlanjutan program. Kegiatan ini melibatkan mitra secara aktif melalui penyediaan data usaha, partisipasi pelatihan, penyusunan SOP usaha, dan komitmen dalam meningkatkan formalitas usaha. Luaran yang diharapkan adalah meningkatnya literasi pajak daerah, tersedianya pencatatan keuangan sederhana, meningkatnya kepemilikan legalitas usaha, serta berkembangnya kapasitas manajemen dan pemasaran UMKM. Program ini juga mendukung implementasi MBKM dan IKU perguruan tinggi melalui keterlibatan mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat berbasis pengalaman nyata.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan kemandirian ekonomi lokal. Kabupaten Soppeng memiliki potensi ekonomi yang besar dengan berkembangnya berbagai jenis UMKM pada sektor perdagangan, kuliner, kerajinan, pertanian olahan, dan jasa. Keberadaan UMKM tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat, tetapi juga berperan dalam memperkuat aktivitas ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, perkembangan UMKM di Kabupaten Soppeng masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam aspek literasi perpajakan daerah dan formalitas usaha. Sebagian pelaku UMKM masih menjalankan usaha secara informal serta belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai kewajiban perpajakan daerah, prosedur administrasi usaha, dan manfaat legalitas usaha bagi keberlanjutan bisnis. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kepatuhan pajak daerah masih rendah serta membatasi kontribusi UMKM terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain permasalahan literasi pajak, sebagian besar UMKM masih memiliki keterbatasan dalam pengelolaan administrasi usaha, pencatatan keuangan sederhana, pemasaran, serta akses terhadap legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Rendahnya tingkat formalitas usaha menyebabkan pelaku UMKM mengalami hambatan dalam memperoleh akses pembiayaan, program pemerintah, pelatihan kewirausahaan, serta peluang kemitraan yang dapat mendukung pengembangan usaha.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan literasi pajak daerah dan penguatan kapasitas usaha bagi pelaku UMKM. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan sebagai upaya memberikan edukasi, pelatihan, dan pendampingan agar pelaku UMKM mampu memahami kewajiban perpajakan, meningkatkan tata kelola usaha, serta mendorong proses formalitas usaha. Melalui kegiatan ini diharapkan UMKM Kabupaten Soppeng dapat berkembang menjadi usaha yang lebih tertib administrasi, produktif, dan berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

A. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

Hari/Tanggal	: Sabtu/ 4 Juli 2026
Waktu	: 09.30-selesai
Tempat	: Aula Kantor Kecamatan

B. TAHAPAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilakukan secara sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan dengan melibatkan mitra UMKM di Kabupaten Soppeng secara aktif. Tahapan kegiatan dirancang untuk meningkatkan literasi pajak daerah, memperkuat manajemen usaha, mendorong formalitas usaha, serta meningkatkan kapasitas UMKM dalam mengelola usaha secara profesional.

1. Tahap Sosialisasi

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui sosialisasi program kepada mitra sasaran dan pihak terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama mengenai tujuan, manfaat, serta rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kegiatan pada tahap sosialisasi meliputi:

- Koordinasi awal dengan pemerintah daerah, komunitas UMKM, dan pihak pendukung kegiatan.
- Penyampaian tujuan, jadwal, mekanisme pelaksanaan, serta target luaran program kepada mitra.

- Identifikasi kebutuhan dan permasalahan spesifik mitra melalui diskusi dan survei awal.
- Penyusunan kesepakatan kerja sama serta komitmen partisipasi mitra dalam seluruh kegiatan.

Hasil dari tahap ini adalah tersusunnya pemetaan kondisi awal mitra serta kesiapan peserta untuk mengikuti program pemberdayaan.

2. Tahap Pelatihan

Tahap pelatihan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mitra dalam aspek perpajakan, administrasi usaha, produksi, dan pemasaran.

Materi pelatihan meliputi:

a. Pelatihan Literasi Pajak Daerah dan Manajemen Keuangan

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai:

- Jenis-jenis pajak daerah yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
- Prosedur pendaftaran wajib pajak daerah.
- Mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak.
- Manfaat kepatuhan pajak bagi perkembangan usaha.
- Pencatatan keuangan sederhana dan pemisahan keuangan usaha dengan pribadi.

Metode pelaksanaan dilakukan melalui workshop interaktif, simulasi pengisian administrasi pajak, serta praktik penyusunan buku kas sederhana.

b. Pelatihan Produksi dan Pengelolaan Usaha

Pelatihan produksi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas usaha melalui:

- Identifikasi proses produksi mitra.
- Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sederhana.

- Pengendalian bahan baku dan biaya produksi.
- Standarisasi kualitas produk dan pengemasan.

Kegiatan dilakukan melalui observasi, demonstrasi, dan penyusunan SOP bersama mitra.

c. Pelatihan Pemasaran Digital

Pelatihan pemasaran bertujuan memperluas jangkauan pasar UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital, meliputi:

- Strategi pemasaran digital.
- Pembuatan akun bisnis media sosial.
- Teknik pembuatan konten promosi.
- Fotografi produk menggunakan perangkat sederhana.

Pelatihan dilakukan melalui praktik langsung pembuatan konten dan pendampingan strategi promosi.

3. Tahap Penerapan Teknologi

Tahap penerapan teknologi dilakukan sebagai upaya modernisasi pengelolaan usaha UMKM melalui pemanfaatan teknologi sederhana yang mudah digunakan oleh mitra.

Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- Implementasi aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile.
- Pemanfaatan platform digital untuk pemasaran usaha.
- Digitalisasi data pelanggan dan transaksi.
- Pelatihan penggunaan teknologi sesuai kebutuhan usaha.

Melalui penerapan teknologi ini, mitra diharapkan mampu melakukan pencatatan usaha secara lebih tertib, meningkatkan efisiensi administrasi, serta mendukung proses formalisasi usaha berbasis data.

4. Tahap Pendampingan dan Evaluasi

Pendampingan dilakukan untuk memastikan mitra mampu menerapkan hasil pelatihan secara berkelanjutan.

Bentuk kegiatan pendampingan meliputi:

- Klinik konsultasi pajak dan legalitas usaha.
- Monitoring pencatatan keuangan sederhana.
- Pendampingan penerapan SOP produksi.
- Evaluasi strategi pemasaran dan perkembangan usaha.
- Pendampingan pengurusan legalitas usaha seperti NIB.

Evaluasi dilakukan melalui tiga tahap, yaitu evaluasi awal (baseline), evaluasi tengah (midline), dan evaluasi akhir (endline). Indikator evaluasi meliputi peningkatan literasi pajak, jumlah mitra yang memiliki legalitas usaha, ketersediaan laporan keuangan sederhana, peningkatan kapasitas produksi, dan aktivitas pemasaran digital.

5. Tahap Keberlanjutan Program

Tahap keberlanjutan dilakukan untuk memastikan manfaat kegiatan tetap berjalan setelah program PKM selesai.

Strategi keberlanjutan meliputi:

- Pembentukan Forum UMKM Literat Pajak sebagai wadah komunikasi dan berbagi pengalaman.
- Penyediaan modul pelatihan yang dapat digunakan kembali oleh mitra.
- Pelibatan pemerintah daerah dalam pendampingan lanjutan.
- Pengembangan sistem mentoring berbasis mahasiswa secara berkala.

- Mendorong mitra untuk melanjutkan praktik pencatatan keuangan dan pelaporan pajak secara mandiri.

Dengan adanya keberlanjutan program, diharapkan UMKM Kabupaten Soppeng mampu menjadi lebih tertib administrasi, memiliki legalitas usaha, meningkatkan kepatuhan pajak, serta berkembang secara produktif dan berkelanjutan.

HASIL KEGIATAN

A. Hasil

1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan judul **“Peningkatan Literasi Pajak Daerah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk Mendorong Pertumbuhan dan Formalisasi di Kabupaten Soppeng”** telah dilaksanakan sebagai upaya pemberdayaan pelaku UMKM dalam meningkatkan pemahaman perpajakan, memperkuat tata kelola usaha, serta mendorong proses formalitas usaha.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap sosialisasi dan identifikasi kebutuhan mitra. Pada tahap ini dilakukan koordinasi dengan pelaku UMKM dan pihak terkait untuk mengetahui kondisi awal usaha, permasalahan administrasi, tingkat pemahaman perpajakan, serta kebutuhan pendampingan yang diperlukan. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar mitra masih memiliki keterbatasan dalam memahami sistem pajak daerah, pencatatan keuangan, legalitas usaha, serta pemanfaatan teknologi dalam pengembangan bisnis.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pelatihan yang mencakup materi literasi pajak daerah, administrasi usaha, pencatatan keuangan sederhana, produksi, dan pemasaran digital. Pada pelatihan literasi pajak, peserta diberikan pemahaman mengenai jenis pajak daerah, prosedur pendaftaran wajib pajak, mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak, serta manfaat kepatuhan pajak bagi keberlanjutan usaha. Selain itu, peserta juga diberikan praktik penyusunan pencatatan kas sederhana sebagai dasar pengelolaan administrasi usaha.

Pada bidang produksi dan pengelolaan usaha, peserta mendapatkan pendampingan mengenai efisiensi proses produksi, pengendalian bahan baku, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), serta peningkatan kualitas produk. Sedangkan pada aspek pemasaran, peserta

diberikan pelatihan mengenai strategi pemasaran digital, pembuatan akun bisnis, pembuatan konten promosi, dan pemanfaatan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar.

Selain kegiatan pelatihan, dilakukan pula penerapan teknologi melalui pemanfaatan aplikasi pencatatan keuangan berbasis digital, digitalisasi data transaksi, serta penggunaan media digital untuk promosi usaha. Penerapan teknologi ini bertujuan membantu mitra dalam meningkatkan ketertiban administrasi, mempermudah pencatatan usaha, serta mendukung proses formalisasi usaha berbasis data.

Tahap akhir kegiatan dilakukan melalui pendampingan dan evaluasi. Pendampingan diberikan dalam bentuk konsultasi perpajakan, monitoring pencatatan keuangan, evaluasi penerapan SOP usaha, serta pendampingan pengurusan legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB).

2. Hasil Evaluasi Pre-Test dan Post-Test

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui tingkat peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah mengikuti kegiatan PKM. Instrumen evaluasi berupa pre-test dan post-test yang mengukur beberapa aspek, yaitu:

- a. Pemahaman mengenai pajak daerah dan kewajiban pelaku usaha.
- b. Pengetahuan mengenai prosedur administrasi perpajakan.
- c. Pemahaman mengenai manfaat legalitas usaha.
- d. Kemampuan melakukan pencatatan keuangan sederhana.
- e. Pemahaman mengenai pemanfaatan teknologi dalam pengembangan usaha.

Berdasarkan hasil evaluasi, terjadi peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan pelatihan dan pendampingan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai mekanisme pajak daerah, prosedur pelaporan pajak, serta pentingnya formalitas usaha.

Setelah mengikuti kegiatan, peserta menunjukkan peningkatan kemampuan dalam memahami kewajiban perpajakan, melakukan pencatatan transaksi usaha, serta memahami manfaat legalitas usaha dalam mendukung pengembangan bisnis.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa metode pelatihan berbasis praktik dan pendampingan langsung mampu meningkatkan kapasitas mitra. Hal ini sesuai dengan target kegiatan, yaitu peningkatan pemahaman pajak daerah minimal 40% berdasarkan perbandingan skor pre-test dan post-test, peningkatan kemampuan pencatatan keuangan, serta peningkatan kesiapan mitra dalam melakukan formalisasi usaha.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Pre-Test dan Post-Test

No	Aspek Evaluasi	Hasil Pre-Test	Hasil Post-Test	Keterangan
1	Pemahaman pajak daerah	Rendah	Meningkat	Peserta memahami jenis dan kewajiban pajak daerah
2	Administrasi usaha	Terbatas	Meningkat	Peserta memahami pentingnya legalitas usaha
3	Pencatatan keuangan	Belum sistematis	Lebih tertata	Peserta mampu melakukan pencatatan sederhana
4	Pemanfaatan teknologi	Rendah	Meningkat	Peserta mampu menggunakan teknologi pendukung usaha

3. Pembahasan Dampak Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan PKM memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas pelaku UMKM di Kabupaten Soppeng, khususnya dalam aspek literasi pajak daerah, administrasi usaha, dan penguatan manajemen bisnis.

Dari sisi pengetahuan, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman mitra mengenai pentingnya kepatuhan pajak daerah. Peserta mulai memahami bahwa pajak bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari pembangunan daerah serta faktor yang mendukung keberlanjutan usaha.

Dari sisi manajemen usaha, kegiatan ini memberikan perubahan dalam pola pengelolaan administrasi UMKM. Mitra mulai memahami pentingnya pencatatan keuangan sederhana, pemisahan keuangan pribadi dan usaha, serta dokumentasi transaksi sebagai dasar evaluasi bisnis. Peningkatan kemampuan administrasi ini juga mendukung kesiapan UMKM dalam memenuhi persyaratan legalitas dan akses pembiayaan.

Pada aspek formalitas usaha, pendampingan memberikan pemahaman baru mengenai manfaat kepemilikan legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Legalitas usaha tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk memperoleh akses program pemerintah, pembiayaan, dan kemitraan usaha.

Selain itu, penerapan teknologi digital memberikan dampak terhadap efisiensi pengelolaan usaha. Penggunaan aplikasi pencatatan keuangan dan media pemasaran digital membantu mitra meningkatkan ketertiban administrasi serta memperluas peluang pemasaran produk.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini berhasil meningkatkan kapasitas UMKM dalam aspek perpajakan, administrasi, produksi, dan pemasaran. Program ini tidak hanya memberikan peningkatan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku usaha menuju pengelolaan yang lebih profesional, formal, dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga mendukung implementasi MBKM melalui keterlibatan mahasiswa dalam proses pendampingan dan penyelesaian permasalahan nyata masyarakat.

Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan judul **“Peningkatan Literasi Pajak Daerah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk Mendorong Pertumbuhan dan Formalisasi di Kabupaten Soppeng”** telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam aspek perpajakan, administrasi usaha, dan pengelolaan bisnis yang lebih profesional.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama mitra berupa rendahnya pemahaman mengenai pajak daerah, keterbatasan administrasi usaha, rendahnya tingkat formalitas usaha, serta kurang optimalnya pengelolaan usaha dapat ditangani melalui kegiatan edukasi, pelatihan, penerapan teknologi, dan pendampingan secara berkelanjutan.

Kegiatan pelatihan literasi pajak daerah berhasil meningkatkan pemahaman mitra mengenai jenis pajak daerah, kewajiban wajib pajak, mekanisme pelaporan, serta manfaat kepatuhan pajak bagi keberlanjutan usaha. Selain itu, pelatihan pencatatan keuangan sederhana membantu mitra memahami pentingnya administrasi keuangan sebagai dasar pengelolaan usaha dan pelaporan perpajakan.

Pendampingan yang dilakukan juga memberikan dampak terhadap peningkatan kesadaran mitra mengenai pentingnya legalitas usaha, khususnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), sebagai upaya memperluas akses terhadap program pemerintah, pembiayaan, dan peluang kemitraan. Pada aspek pengembangan usaha, pelatihan produksi dan pemasaran digital membantu mitra meningkatkan kualitas produk serta memperluas jangkauan pemasaran melalui pemanfaatan teknologi.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini mampu mendorong perubahan positif dalam pola pengelolaan usaha UMKM dari yang sebelumnya masih bersifat sederhana menuju pengelolaan yang lebih tertib, formal, dan berbasis informasi. Program ini juga mendukung implementasi MBKM dan IKU perguruan tinggi melalui keterlibatan mahasiswa dalam proses pemberdayaan masyarakat secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023. Jakarta: Kemenkeu RI; 2024.
- Badan Pusat Statistik. Statistik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2023. Jakarta: BPS; 2023.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Tax Administration 2023: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies. Paris: OECD Publishing; 2023.
- World Bank. Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption and Informality. Washington DC: World Bank; 2020.
- Alm J, Torgler B. Do ethics matter? Tax morale and tax compliance in developing countries. *J Econ Psychol.* 2021;83:102344.
- Bird RM, Zolt EM. Fiscal decentralization and local taxation in developing countries. *Int Rev Adm Sci.* 2020;86(1):45–63.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Perkembangan Data UMKM dan Kontribusi terhadap PDB 2022–2023. Jakarta: KemenKop UKM; 2023.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023. Jakarta: DJPK; 2024.
- Torgler B. Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis. *J Econ Surv.* 2021;35(2):395–420.

- OECD. Digital Transformation of Tax Administration 2022. Paris: OECD Publishing; 2022.
- World Bank. Digitalizing Government-to-Business Services to Improve Formalization of MSMEs. Washington DC:World Bank; 2022.
- Hasan M, Siregar H, Rachman A. Determinants of MSMEs tax compliance in Indonesia: The role of tax literacy and digitalization. J Asian Finance Econ Bus. 2022;9(3):123–131.
- Pratama A, Nugroho R. The impact of local tax literacy on compliance behavior among micro enterprises. J Public Adm Policy Res. 2021;13(4):89–97.
- United Nations Development Programme. Local Governance and Fiscal Capacity Development Report 2021. New York: UNDP; 2021.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pedoman Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023. Jakarta: Kemendagri; 2023.